



RENCANA KERJA (REVISI) TAHUN 2016

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PENGANTAR

Setiap pengambil kebijakan dituntut untuk dapat menyusun langkah pencapaian yang strategis untuk dapat mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensi akibat adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN-P), target/output indikator kinerja pada beberapa kegiatan pun mengalami perubahan. Penyesuaian target/output suatu kegiatan dilakukan agar implementasi kegiatan lingkup Badan P2SDM tetap dapat dilakukan secara efektif sehingga kinerja setiap satker tetap sesuai pada tatarannya. Dokumen ini disusun sebagai tambahan (suplemen) untuk merevisi sekaligus menyempurnakan Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan Kepala Badan P2SDM Tahun 2015.

Jakarta, Agustus 2016

KEPALA BADAN,



Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM

NIP. 19561215 198203 1 002

PENDAHULUAN

Persoalan mendasar dalam APBN adalah bahwa adanya keterbatasan dana pada satu sisi, sementara pada sisi lain pemerintah berkewajiban untuk menangani isu strategis. Oleh karenanya pemerintah harus mampu menciptakan belanja Negara yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber dana yang terbatas agar digunakan secara terukur, efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas belanja Negara tersebut Pemerintah harus mendorong terpenuhinya aspek efisiensi dan efektivitas dalam seluruh tahapan penyusunan APBN, yaitu mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga tahap pelaporan. Selama ini tolok ukur untuk melihat kinerja belanja Negara lebih didasarkan pada pendekatan tingkat penyerapan belanja. Semakin besar tingkat penyerapan, dianggap semakin optimal kinerja belanjanya dan sebaliknya, semakin rendah tingkat penyerapan semakin rendah pula kinerja belanja suatu K/L. Pada Tahun 2016 ini, pemerintah melakukan efisiensi dengan melakukan penghematan anggaran melalui APBN-Perubahan. Perubahan APBN dilakukan dengan tujuan mengefisienkan kegiatan terutama untuk kegiatan lelang, perjalanan dinas, rapat dan konsinyering. Anggaran akan lebih difokuskan kepada program-program prioritas ditengah tantangan perekonomian global yang terjadi saat ini. Meski pemotongan tidak merata di semua K/L namun pemerintah tetap memperhatikan kemampuan realisasi anggaran sesuai target dan memastikan program prioritas serta program yang sudah berjalan tidak akan disentuh.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, serta mencapai target sasaran sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu,

dilakukan penyesuaian target/output kegiatan pada satker lingkup Badan P2SDM sesuai dengan revisi anggaran APBN-P berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri LHK tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Revisi) Badan P2SDM Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk menyempurnakan isi dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016 yang telah disusun sebelumnya serta perubahan target/output beberapa kegiatan akibat adanya perubahan APBN. Dokumen ini disusun untuk tetap mendukung keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016.

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Kerja (Revisi) Badan P2SDM Tahun 2016 ini adalah sebagai acuan kerangka kerja seluruh satuan kerja lingkup Badan P2SDM baik Pusat maupun UPT sesuai tugas dan fungsinya. Serta sebagai salah satu acuan pengukuran sasaran kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan P2SDM memiliki tanggung jawab terhadap Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Selama periode berjalan, terdapat perubahan anggaran belanja Negara sesuai instruksi Presiden. Akibat adanya perubahan APBN tersebut, target indikator kinerja pada Tahun 2016 pun mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada beberapa kegiatan di lingkup BP2SDM. Hal ini juga mengakibatkan indikator kinerja program (IKP) mengalami perubahan target. Pada dokumen renja revisi Badan P2SDM Tahun 2016 ini tercantum target-target yang mengalami perubahan, serta perbaikan narasi pada dokumen Rencana Kerja BP2SDM 2016 sebagai bentuk penyempurnaan isi dokumen. Badan P2SDM memiliki 6 kegiatan yang terangkum dalam 4 (empat) target indikator kinerja program (Tabel 1 dan 2). Sedangkan rincian indikator kinerja kegiatan lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 1. Sasaran program Badan P2SDM Tahun 2016 (APBN)

<i>Sasaran Program</i>	<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Target 2016</i>
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya, 472 unit KTH dan Koperasi.
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 1.100 orang • Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 4.680 orang. • Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 4.500 orang, dan 700 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH.

Tabel 2. Target indikator kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 (APBN)

Target IKP	Tahun
	2016
1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	1.100 org
2. Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 57.640 orang.	4.680 org
3. Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH.	4.500 org 700 unit
4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	472 unit

Tabel 3. Indikator kinerja kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2016 (APBN)

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
(1)	(2)
Perencanaan Pengembangan SDM Sasaran: <i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten</i>	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 600 orang *
	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 500 orang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</i>	a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 2.890 orang
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 40 orang
	c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 2 unit KHDTK
	d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 600 orang
	e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 450 orang
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran: <i>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</i>	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 700 orang **
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup</i>	a. Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya, 500 orang
	b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 1.000 orang
	c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup(adiwiyata) 700 unit sekolah/kampus
	d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 3.000 orang

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
(1)	(2)
Peningkatan Penyuluhan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 450 KTH b. Jumlah koperasi KTH yang dibentuk, 22 unit c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 15 unit d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan, 450 orang
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sasaran: <i>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016.

Keterangan :

* = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 1.777 orang yang terdiri dari 600 orang sesuai Renja dan 1.177 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan;

** = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 719 orang sesuai dengan keberadaan siswa kelas III yang dikelola pada tahun ajar 2015-2016.

Alokasi pagu anggaran Tahun 2016 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp. 360.838.691.000,-. Rincian anggaran per satker lingkup Badan P2SDM tercantum pada Tabel 2 berikut.

Tabel 4. Rincian Anggaran APBN per satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2016

(dalam ribuan rupiah)

SATUAN KERJA	JENIS BELANJA					JUMLAH (2+5+6)
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL	
		Operasional	Non Operasional	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
Setbadan P2SDM	14.624.700	2.804.947	13.470.553	16.275.500	164.800	31.065.000
Pusrenbang SDM	0	1.200.000	65.358.000	66.558.000	70.000	66.628.000
Pusluh	0	1.200.000	19.299.000	20.499.000	200.000	20.699.000
Puslatmas dan PGL	4.080.205	3.000.000	11.135.795	14.135.795	212.000	18.428.000
Pusdiklat SDM LHK	13.119.348	3.000.000	29.552.652	32.552.652	30.000	45.702.000
BDLHK Pematangsiantar	6.262.140	1.600.000	3.775.185	5.375.185	1.325.675	12.963.000
BDLHK Pekanbaru	7.064.470	1.600.000	3.758.930	5.358.930	1.341.600	13.765.000
BDLHK Bogor	8.057.100	1.600.000	6.415.026	8.015.026	780.874	16.853.000
BDLHK Kadipaten	7.343.537	1.600.000	4.153.763	5.753.763	1.376.700	14.474.000
BDLHK Samarinda	5.938.741	1.600.000	4.292.833	5.892.833	1.607.426	13.439.000
BDLHK Makassar	7.705.787	1.600.000	6.995.213	8.595.213	1.105.000	17.406.000
BDLHK Kupang	6.877.046	1.600.000	4.210.879	5.810.879	2.575.075	15.263.000
SMKK Pekanbaru	4.399.099	1.250.000	5.300.073	6.550.073	3.199.828	14.149.000

SATUAN KERJA	JENIS BELANJA					JUMLAH (2+5+6)
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL	
		Operasional	Non Operasional	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
SMKK Kadipaten	4.160.222	1.250.000	5.615.078	6.865.078	3.084.700	14.110.000
SMKK Samarinda	3.126.818	1.250.000	4.227.925	5.477.925	7.004.257	15.609.000
SMKK Makassar	3.958.280	1.250.000	5.214.443	6.464.443	3.485.277	13.908.000
SMKK Manokwari	6.227.560	2.150.000	5.101.397	7.251.397	2.898.734	16.377.691
JUMLAH	102.945.053	29.554.947	197.876.745	227.431.692	30.461.946	360.838.691

Pada saat APBN-P Tahun 2016 disahkan, melalui usulan Revisi Anggaran sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 bahwa usulan revisi APBN-P TA 2016 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM telah disahkan dan database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui. Dengan pengesahan APBN-P TA 2016 ini, pagu anggaran Badan P2SDM mengalami pengurangan pagu sebesar Rp. 15.147.146.000,- menjadi Rp. 345.691.545.000,-. Rincian perubahan alokasi pagu APBN-P Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 3 dan 4 berikut.

Tabel 5. Rincian Perubahan alokasi Pagu APBN menjadi Pagu APBN-P Badan P2SDM Tahun 2016

(dalam ribuan rupiah)

NO	KEGIATAN	PAGU APBN 2016	PERUBAHAN			PAGU APBN-P 2016
			OPERASIONAL	PERJADIN, PAKET MEETING, KEGIATAN NON PRIORITAS	JUMLAH	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	31.065.000	-312.752	-1.415.251	-1.728.003	29.336.997
2	Perencanaan Pengembangan SDM	66.628.000	-133.800	-796.428	-930.228	65.697.772
3	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi LH	18.428.000	-334.500	-1.165.424	-1.499.924	16.928.076
4	Peningkatan Penyuluhan	20.699.000	-133.800	-2.018.147	-2.151.947	18.547.053
5	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	146.565.000	-1.583.300	-1.568.600	-3.151.900	143.413.100
6	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	77.453.691	-797.225	-4.887.919	-5.685.144	71.768.547
TOTAL		360.838.691	-3.295.377	-11.851.769	-15.147.146	345.691.545

Tabel 6. Rincian Anggaran APBN-P per satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2016

(dalam ribuan rupiah)

SATUAN KERJA	JENIS BELANJA					JUMLAH (2+5+6)
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL	
		Operasional	Non Operasional	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
Setbadan P2SDM	14.624.700	2.492.195	12.147.052	14.639.247	73.050	29.336.997
Pusrenbang SDM	0	1.066.200	64.561.572	65.627.772	70.000	65.697.772
Pusluh	0	1.066.200	17.280.853	18.347.053	200.000	18.547.053
Puslatmas dan PGL	4.080.205	2.665.500	9.970.371	12.635.871	212.000	16.928.076
Pusdiklat SDM LHK	13.119.348	2.665.500	27.227.610	29.893.110	30.000	43.042.458
BDLHK Pematangsiantar	6.262.140	1.421.600	3.766.424	5.188.024	1.181.410	12.631.574
BDLHK Pekanbaru	7.064.470	1.826.240	3.284.854	5.111.094	1.258.020	13.433.584
BDLHK Bogor	8.057.100	1.663.940	5.765.349	7.429.289	972.334	16.458.723
BDLHK Kadipaten	7.343.537	1.421.600	4.153.763	5.575.363	1.210.786	14.129.686
BDLHK Samarinda	5.938.741	2.262.397	3.165.879	5.428.276	1.716.575	13.083.592
BDLHK Makassar	7.705.787	1.421.600	6.889.628	8.311.228	967.579	16.984.594
BDLHK Kupang	6.877.046	1.476.675	4.155.804	5.632.479	2.371.496	14.881.021
SMKKN Pekanbaru	4.399.099	1.739.005	6.268.374	8.007.379	1.028.147	13.434.625
SMKKN Kadipaten	4.160.222	1.110.625	6.597.748	7.708.373	1.527.030	13.395.625
SMKKN Samarinda	3.126.818	1.548.658	5.740.989	7.289.647	4.592.535	15.009.000
SMKKN Makassar	3.958.280	1.110.625	7.337.097	8.447.722	787.623	13.193.625
SMKKN Manokwari	6.227.560	1.910.275	6.364.837	8.275.112	1.000.868	15.503.540
JUMLAH	102.945.053	28.868.835	194.678.204	223.547.039	19.199.453	345.691.545

Akibat adanya perubahan pagu anggaran pada Badan P2SDM beberapa target/output kegiatan disesuaikan kembali agar kegiatan yang dilaksanakan tetap dapat menunjang keberhasilan program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM Tahun 2016. Target tersebut mengalami perubahan dengan mempertimbangkan agar tetap terciptanya belanja barang yang berkualitas namun tetap dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Perubahan target/output sesuai pagu anggaran APBN-P terdapat pada 3 indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu:

- 1) Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK yang dinaungi oleh Pusdiklat SDM LHK;
- 2) Jumlah kader lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya, pada kegiatan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan yang dinaungi oleh Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan; dan

- 3) Jumlah anggota saka kalpataru yang peduli dan berbudaya lingkungan pada kegiatan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan yang dinaungi oleh Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan.

Tabel 7. Sasaran program Badan P2SDM Tahun 2016 (APBN-P)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2016
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 472 unit KTH dan Koperasi.
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 1.100 orang Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 4.675 orang. Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 3.900 orang, dan 700 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH.

Tabel 8. Target indikator kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 (APBN-P)

Target IKP	Tahun 2016
1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	1.100 org
2. Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 57.640 orang.	4.675 org
3. Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH.	3.900 org 700 unit
4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	472 unit

Tabel 9. Perubahan target/output kegiatan akibat adanya perubahan pagu Badan P2SDM Tahun 2016

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
(1)	(2)
Perencanaan Pengembangan SDM Sasaran:	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 600 orang *

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
<i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten</i>	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 500 orang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</i>	a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 2.885 orang
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 40 orang
	c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 2 unit KHDTK
	d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 600 orang
	e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 450 orang
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran: <i>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</i>	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 700 orang **
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan</i>	a. Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya, 400 orang
	b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 1.000 orang
	c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup(adiwiyata) 700 unit sekolah/kampus
	d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 2.500 orang
Peningkatan Penyuluhan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 450 KTH
	b. Jumlah koperasi KTH yang dibentuk, 22 unit
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 15 unit
	d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan, 450 orang
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sasaran: <i>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM</i>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016.

Keterangan :

* = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 1.777 orang yang terdiri dari 600 orang sesuai Renja dan 1.177 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan;

** = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 719 orang sesuai dengan keberadaan siswa kelas III yang dikelola pada tahun ajar 2015-2016.

Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2016 yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016, Kementerian LHK mengalami penghematan melalui mekanisme *self blocking* tersebut sebesar Rp. 871.727.007.000,-. Menindaklanjuti instruksi presiden tersebut, berdasarkan Surat Menteri LHK Nomor S.389/MENLHK/SETJEN/SET1/9/2016 tentang *Self Blocking* anggaran KLHK TA 2016 Tahap ke-2, Badan P2SDM mengalami penghematan (*self blocking*) sebesar Rp. 13.624.030.000,-. Rincian alokasi anggaran APBN-Perubahan per satker lingkup Badan P2SDM tercantum pada Tabel 5 berikut.

Tabel 10. Rincian penghematan (*self blocking*) per satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2016

(dalam ribuan rupiah)

SATUAN KERJA	JENIS BELANJA					JUMLAH (2+5+6)
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL	
		Operasional	Non Operasional	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
Setbadan P2SDM	14.624.700	2.492.195	9.437.752	11.929.947	73.050	26.627.697
Pusrenbang SDM	0	1.066.200	63.213.802	64.280.002	70.000	64.350.002
Pusluh	0	1.066.200	15.780.853	16.847.053	200.000	17.047.053
Puslatmas dan PGL	4.080.205	2.665.500	7.712.051	10.377.551	212.000	14.669.756
Pusdiklat SDM LHK	13.119.348	2.665.500	24.469.510	27.135.010	30.000	40.284.358
BDLHK Pematangsiantar	6.262.140	1.421.600	3.461.524	4.883.124	1.181.410	12.326.674
BDLHK Pekanbaru	7.064.470	1.826.240	3.072.724	4.898.964	1.258.020	13.221.454
BDLHK Bogor	8.057.100	1.663.940	5.249.719	6.913.659	972.334	15.943.093
BDLHK Kadipaten	7.343.537	1.421.600	3.738.853	5.160.453	1.210.786	13.714.776
BDLHK Samarinda	5.938.741	2.262.397	2.842.499	5.104.896	1.716.575	12.760.212
BDLHK Makassar	7.705.787	1.421.600	5.961.238	7.382.838	967.579	16.056.204
BDLHK Kupang	6.877.046	1.476.675	3.804.604	5.281.279	2.371.496	14.529.821
SMKKN Pekanbaru	4.399.099	1.739.005	6.268.374	8.007.379	1.028.147	13.434.625
SMKKN Kadipaten	4.160.222	1.110.625	6.597.748	7.708.373	1.527.030	13.395.625
SMKKN Samarinda	3.126.818	1.548.658	5.740.989	7.289.647	4.592.535	15.009.000
SMKKN Makassar	3.958.280	1.110.625	7.337.097	8.447.722	787.623	13.193.625
SMKKN Manokwari	6.227.560	1.910.275	6.364.837	8.275.112	1.000.868	15.503.540
JUMLAH	102.945.053	28.868.835	181.054.174	211.923.009	19.199.453	332.067.515

Dengan adanya mekanisme penghematan (*self blocking*) ini, tidak sepenuhnya anggaran APBN-P pada setiap satker lingkup Badan P2SDM dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Apabila hingga akhir Bulan Desember tahun 2016 mekanisme penghematan (*self blocking*) ini tetap dilaksanakan, maka dampaknya adalah target pada beberapa kegiatan tidak dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah direncanakan.

PENUTUP

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM melalui program peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, disusun rencana kerja Badan P2SDM Tahun 2016 yang memuat rencana kegiatan selama satu tahun. Akibat terjadinya perubahan pagu anggaran Badan P2SDM Tahun 2016, perlu diadakan penyempurnaan terhadap dokumen renja Badan P2SDM Tahun 2016 yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renja (revisi) ini menjadi suplemen atau penyempurna dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM sebelumnya yang juga menjadi acuan oleh setiap satker lingkup Badan P2SDM dalam melaksanakan kegiatannya.

Melalui penyusunan dokumen rencana kerja (revisi) Badan P2SDM Tahun 2016 ini, diharapkan setiap pelaksana kegiatan tetap dapat bekerja dan melaksanakan kegiatan sesuai target/output yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.



-- LAMPIRAN --

a) Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1)

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran APBN-P)
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK1)				Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM (65,70 Milyar)
Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK aparatur	a. Pemetaan SDM aparatur LHK (K1.UK1.IUK1)	Prov	34	
	b. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur Kehutanan di KPH (K1.UK1.IUK2)	Dok	1	
	c. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya (K1.UK1.IUK3)	Dok	1	
	d. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya (K1.UK1.IUK4)	Lap	1	
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK2)				
Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK non aparatur	a. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang dikelola (K1.UK2.IUK1)	Org	600*	
	b. Pemetaan SDM Non Aparatur LHK (K1.UK2.IUK2)	Prov	34	
	c. Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan di KPH (K1.UK2.IUK3)	Dok	1	
	d. Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya (K1.UK2.IUK4)	Dok	1	
	e. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Non Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya (K1.UK2.IUK5)	Lap	1	
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK3)				
Meningkatnya SDM LHK yang kompeten	a. Jumlah SDM LHK pendukung KPH yang diuji kompetensi /sertifikasi (K1.UK3.IUK1)	Org	500	
	b. Dokumen standar kompetensi SDM LHK (K1.UK3.IUK2)	Dok	4	

Keterangan : * = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 1.777 orang yang terdiri dari 600 orang sesuai Renja dan 1.177 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran APBN-P)
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)				Pusat Diklat SDM LHK (43,04 Milyar) Balai Diklat LHK (101,60 Milyar)
Tersedianya rencana pengembangan diklat dan pembelajaran e-learning	a. Jumlah draft peraturan Kediklatan (K2.UK1.IUK1)	Ranc Peraturan	3	
	b. Jumlah Kurikulum dan Silabus (K2.UK1.IUK2)	Dok	20	
	c. Laporan pelaksanaan pembelajaran e-learning (K2.UK1.IUK3)	Lap	1	
	d. Pengelolaan KHDTK (K2.UK1.IUK4)	Unit	2	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)				
Terselenggaranya Diklat Teknis bagi SDM LHK	a. Jumlah Diklat Teknis (K2.UK2.IUK1)	Org	1.827	
	b. Jumlah Diklat fungsional (K2.UK2.IUK2)	Org	265	
	c. Jumlah karyasiswa program S2 dalam negeri (K2.UK2.IUK3)	Org	35	
	d. Jumlah karyasiswa program S3 dalam negeri (K2.UK2.IUK4)	Org	5	
	e. Laporan Pengelolaan pendidikan lanjutan (K2.UK2.IUK5)	Lap	1	
	f. Jumlah tenaga Bakti Rimbawan yang meningkat kapasitasnya (K2.UK2.IUK6)	Org	600	
	g. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya (K2.UK2.IUK7)	Org	450	
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)				
Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan dan administrasi bagi SDM LHK	a. Jumlah Diklat prajabatan (K2.UK3.IUK1)	Org	453	
	b. Jumlah Diklat administrasi (K2.UK3.IUK2)	Org	260	
	c. Jumlah Diklat kepemimpinan (K2.UK3.IUK3)	Org	80	
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran	a. Dokumen Rencana dan Program (K2.UK4.IUK1)	Dok	3	
	b. Dokumen Kepegawaian (K2.UK4.IUK2)	Dok	1	
	c. Dokumen administrasi dan pengelolaan BMN (K2.UK4.IUK3)	Dok	2	

c) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran APBN-P)
Penyediaan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (UK)				SMKKN (73,84 Milyar)
Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan untuk mendukung KPH	a. Jumlah pendidikan siswa SMK Kehutanan (K3.UK.IUK1)	Org	700**	
	b. Laporan Pelaksanaan system manajemen mutu : ISO 9002 – 2008 (K3.UK.IUK2)	Lap	1	
	c. Dokumen perencanaan dan pembinaan (K3.UK.IUK3)	Dok	1	
	d. Laporan pelaksanaan publikasi pendidikan (K3.UK.IUK4)	Lap	1	
	e. Laporan kerjasama pendidikan (K3.UK.IUK5)	Lap	1	

Keterangan : ** = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 719 orang sesuai dengan keberadaan siswa kelas III yang dikelola pada tahun ajar 2015-2016.

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran APBN-P)
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (UK1)				Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (16,93 Milyar)
Terselenggaranya pelatihan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kader lingkungan hidup	a. Jumlah generasi muda LH yang meningkat kapasitasnya (K4.UK1.IUK1)	Org	1.000	
	b. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas generasi Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan (K4.UK1.IUK2)	Draft	4	
Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan (UK2)				
Terselenggaranya ekspos generasi lingkungan	a. Jumlah kader LH yang dilatih/dibentuk dan dibina (K4.UK2.IUK1)	Org	400	
	b. Jumlah ekspos/pameran generasi lingkungan hidup (K4.UK2.IUK2)	Org	2.000	
	c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas kader Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan (K4.UK2.IUK3)	Draft Peraturan	6	
Pengembangan Generasi Lingkungan (UK3)				
Terwujudnya sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	a. Jumlah sekolah/ kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan (K4.UK3.IUK1)	Unit	700	
	b. Jumlah anggota Pramuka Penegak dan Pandega dan/atau anggota Saka Kalpataru yang meningkat kapasitasnya (K4.UK3.IUK2)	Org	2.500	
	c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis tentang program sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang disusun atau dikembangkan (K4.UK3.IUK3)	Draft	6	
	d. Laporan pembinaan program adiwiyata (K4.UK3.IUK4)	Lap	4	
	e. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis tentang Saka Kalpataru yang disusun atau dikembangkan (K4.UK3.IUK5)	Draft	5	
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran	a. Dokumen Rencana dan Program (K4.UK4.IUK1)	Dok	3	
	b. Dokumen Kepegawaian (K4.UK4.IUK2)	Dok	1	
	c. Dokumen administrasi, pelaporan dan pengelolaan BMN (K4.UK4.IUK3)	Dok	4	

e) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan (K5)

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran APBN-P)
Pengembangan Penyuluhan (UK1)				Pusat Penyuluhan (18,55 Milyar)
Tersedianya perangkat pengembangan penyuluhan kehutanan	a. Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja penyuluhan LHK (K5.UK1.IUK1)	Dok	6	
	b. Pengembangan Metoda Penyuluhan (K5.UK1.IUK2)	Dok	4	
	c. Pengembangan Materi Penyuluhan (K5.UK1.IUK3)	Dok	14	
	d. Dokumen administrasi, pelaporan dan pengelolaan BMN (K5.UK1.IUK4)	Dok	4	
Ketenagaan Penyuluhan (UK2)				
Meningkatnya kapasitas penyuluh aparatur dan non aparatur	a. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan (K5.UK2.IUK1)	Org	450	
	b. Fasilitasi pembinaan penyuluhan aparatur (K5.UK2.IUK2)	Org	300	
	c. Fasilitasi pembinaan penyuluhan non aparatur (K5.UK2.IUK3)	Org	150	
Kelembagaan Penyuluhan (UK3)				
Pemantapan ke lembaga penyuluh	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH (K5.UK3.IUK1)	Unit	450	
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang terbentuk (K5.UK3.IUK2)	Unit	22	
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) (K5.UK3.IUK3)	Unit	15	

f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (K6)

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target 2016	Penanggung Jawab (Anggaran APBN-P)
Koordinasi Tata Kelola Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama (UK1)				Sekretariat BP2SDM (29,34 Milyar)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan kerjasama	a. Pembinaan administrasi dan teknis perencanaan/program (K6.UK1.IUK1)	Lap	6	
	b. Pembinaan administrasi dan teknis revisi anggaran (K6.UK1.IUK2)	Lap	6	
	c. Pengembangan kerjasama teknis penyuluhan dan pengembangan SDM (K6.UK1.IUK3)	Lap	6	
Koordinasi Tata kelola Keuangan dan Umum (UK2)				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan	a. Pembinaan administrasi umum (K6.UK2.IUK1)	Lap	5	
	b. Pembinaan administrasi keuangan (K6.UK2.IUK2)	Lap	16	
	c. Pembinaan administrasi perlengkapan (K6.UK2.IUK3)	Lap	4	
Koordinasi Tata Kelola informasi, publikasi dan evaluasi (UK3)				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi Penyusunan informasi, publikasi dan evaluasi	a. Pengembangan informasi (K6.UK3.IUK1)	Lap	5	
	b. Pengembangan dokumentasi dan publikasi (K6.UK3.IUK2)	Lap	5	
	c. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan (K6.UK3.IUK3)	Lap	20	
Koordinasi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana (UK4)				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana	a. Pembinaan administrasi kepegawaian (K6.UK4.IUK1)	Lap	5	
	b. Pembinaan jabatan fungsional (K6.UK4.IUK2)	Lap	5	
	c. NSPK peraturan perundangan P2SDM (K6.UK4.IUK3)	Draft peraturan	10	
Layanan Perkantoran		Bulan	12	
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Unit	10	
Gedung/Bangunan		M	60	